

HIKMAH

Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam

1. Dakwah dan Bimbingan Konseling di Masyarakat
Oleh: Kamaluddin
2. Dakwah Multikulturalisme
Oleh: Mohd. Rafiq
3. Umat Islam Sebagai Sasaran Dakwah
Oleh: Enung Asmaya
4. Tantangan Dakwah di Era Kebebasan Pers
Oleh: Hamdan Daulay
5. Peran Konselor Islami dalam Pelaksanaan Bimbingan
(Konselor Islami, Ciri-ciri Kepribadian Konselor Islami,
Kriteria Konselor Islami)
Oleh: Maslina Daulay
6. Pengertian, Arah dan Tujuan Dakwah dan Pemberdayaan
Oleh: Anas Habibi Ritonga
7. Urgensi Landasan Religius dalam Profesi Bimbingan dan
Konseling
Oleh: Pahri Siregar
8. Kontribusi Kode Etik Da'i Terhadap Keberhasilan Dakwah
Oleh: Hamlan
9. *Self Regulated Learning*: Upaya Meningkatkan Prestasi Akademik
Oleh: Muhammad Syukri Pulungan
10. Konseling Religius dalam Menangani Gangguan Mental
Oleh: Arifin Hidayat

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**



HIKMAH

Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam
Volume II Nomor 02 Juli – Desember 2015

DAFTAR ISI

Susunan Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
I. Dakwah dan Bimbingan Konseling di Masyarakat Oleh: Kamaluddin	1-19
II. Dakwah Multikulturalisme Oleh: Mohd. Rafiq.....	20-34
III. Umat Islam Sebagai Sasaran Dakwah Oleh: Enung Asmaya	35-50
IV. Tantangan Dakwah di Era Kebebasan Pers Oleh: Hamdan Daulay	51-66
V. Peran Konselor Islami dalam Pelaksanaan Bimbingan (Konselor Islami, Ciri-ciri Kepribadian Konselor Islami, Kriteria Konselor Islami) Oleh: Maslina Daulay	67-82
VI. Pengertian, Arah dan Tujuan Dakwah dan Pemberdayaan Oleh: Anas Habibi Ritonga.....	83-98
VII. Urgensi Landasan Religius dalam Profesi Bimbingan dan Konseling Oleh: Pahri Siregar	99-114
VIII. Kontribusi Kode Etik Da'i Terhadap Keberhasilan Dakwah Oleh: Hamlan.....	115-132
IX. Self Regulated Learning: Upaya Meningkatkan Prestasi Akademik Oleh: Muhammad Syukri Pulungan	133-148
X. Konseling Religius Dalam Menangani Gangguan Mental Oleh: Arifin Hidayat.....	149-167

TANTANGAN DAKWAH DI ERA KEBEBASAN PERS

Oleh: Hamdan Daulay

Abstract

Mass media have crucial roles in propogating information in society. News published through mass media, both the positive and the negative ones will be so highly accessible to public that they influence the way society thinks. If the published information is true and honest, it will result in positive impacts. On the other hand, if the published information is untrue, dishonest, and it instigates hatred, it will negative impacts and it can even trigger conflicts amongst society members. For those reasons, according to John Hohenberg, news in mass media must al all times prioritize the factors of actuality, honesty, and education. To carry out those functions, it is not an overstatement to say that mass media are said to uphold noble duties playing big roles in educating the nation.

Press institutions are continuously trying to improve image of journalists in society. Press figures in Indonesia, the majority of whom are muslims, constantly attempt to incorporate muslim values in journalistic ethics. This has goals that all Indonesian journalists have good ethics in carrying out their journalistic duties. Amidst myriads of moral challenges in the press reports nowadays, it is highly vital to increase ethics actualization in the profession of journalist. The attempt of ethics building is not merely theoretical in the journalistic ethics, but the journalists also establish union of Indonesia muslim journalists as an evidence of commitment to Islam values in performing journalistic duties.

In a good activity of propogation of faith (dakwah), mass media aspect must ideally be seriously scrutinized so that the propogation of faith can be expected to produce maximum effects. Nowadays many muslims judge that the presence of mass media displays negative things, so mass media are thought of to take part in the growth of evil deeds. On the other hand in this modernization era the presence of mass media is becoming extremely urgent in the activity of propogation of faith. Muslim do not need to abhor mass media, but, on the contrary, muslims must befriend mass media. Mass media must be correctly managed, so they can be tools to succeed the activity of propogation of faith. For that purpose, Muslims must plan ahead to prepare skillful preachers of propogation of faith who are proficient in the field of mass media.

Keyword: Propogation of Faith (Dakwah), Press Freedom, Mass Media, Journalistic Ethics.

TANTANGAN DAIKWAH DI ERA KEBEBASAN PERS

Oleh: Hamdan Daulay

Abstract

Mass media have crucial roles in propogating information in society. News published through mass media, both the positive and the negative ones will be so highly accessible to public that they influence the way society thinks. If the published information is true and honest, it will result in positive impacts. On the other hand, if the published information is untrue, dishonest, and it instigates hatred, it will negative impacts and it can even trigger conflicts amongst society members. For those reasons, according to John Hohenberg, news in mass media must al all times prioritize the factors of actuality, honesty, and education. To carry out those functions, it is not an overstatement to say that mass media are said to uphold noble duties playing big roles in educating the nation.

Press institutions are continuously trying to improve image of journalists in society. Press figures in Indonesia, the majority of whom are muslims, constantly attempt to incorporate muslim values in journalistic ethics. This has goals that all Indonesian journalists have good ethics in carrying out their journalistic duties. Amidst myriads of moral challenges in the press reports nowadays, it is highly vital to increase ethics actualization in the profession of journalist. The attempt of ethics building is not merely theoretical in the journalistic ethics, but the journalists also establish union of Indonesia muslim journalists as an evidence of commitment to Islam values in performing journalistic duties.

In a good activity of propogation of faith (dakwah), mass media aspect must ideally be seriously scrutinized so that the propogation of faith can be expected to produce maximum effects. Nowadays many muslims judge that the presence of mass media displays negative things, so mass media are thought of to take part in the growth of evil deeds. On the other hand in this modernization era the presence of mass media is becoming extremely urgent in the activity of propogation of faith. Muslim do not need to abhor mass media, but, on the contrary, muslims must befriend mass media. Mass media must be correctly managed, so they can be tools to succeed the activity of propogation of faith. For that purpose, Muslims must plan ahead to prepare skillful preachers of propogation of faith who are proficient in the field of mass media.

Keyword: Propogation of Faith (Dakwah), Press Freedom, Mass Media, Journalistic Ethics.

A. Pendahuluan

Dakwah adalah ibarat lentera kehidupan yang memberi cahaya dan menerangi hidup manusia dari nestapa kegelapan. Tatkala manusia dilanda kegersangan spiritual, dengan rapuhnyanya akhlak, dakwah diharapkan mampu memberi cahaya terang. Maraknya berbagai ketimpangan, kecurangan dan krisis moral lainnya, disebabkan terkikisnya nilai-nilai agama dalam diri manusia. Tidak berlebihan jika dakwah merupakan bagian yang cukup penting bagi umat manusia saat ini.¹

Namun dalam realitanya, dakwah yang hadir di tengah umat saat ini masih dominan dengan retorika. Artinya, kita belum bisa mewujudkan kesatuan kata dengan tindakan. Dakwah juga terkadang tidak bisa memberikan kesejukan kepada umat, justru terkadang menimbulkan keresahan manakala dakwah yang disampaikan sangat eksklusiv dengan menganggap kelompoknyalah yang paling benar dan kelompok yang lain salah dan sesat. Apalagi saat ini banyak media massa memberitakan, bahwa muncul berbagai kelompok ormas keislaman di tengah masyarakat, yang membuat paham dan aliran pemikiran menyimpang dengan berbagai model dakwah. Ketika model dakwah yang disampaikan oleh ormas keislaman itu bisa memberi kesejukan dan kedamaian di tengah masyarakat tentu tidak ada masalah dan justru memberi dampak positif. Namun manakala model dakwah disampaikan sangat eksklusiv dan menganggap kelompoknyalah yang paling benar, dan kelompok lain salah dan sesat, akan bisa menimbulkan masalah dan keresahan, sehingga akan menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat.

Di sisi lain kebebasan pers yang tak terkendali dewasa ini dikhawatirkan semakin menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dengan dalih kebebasan pers, semakin banyak penampilan media yang cenderung merusak moral. Publikasi foto-foto vulgar di media massa misalnya kini sudah dianggap hal biasa, karena itu dianggap bagian dari kebebasan pers. Namun persoalan berikutnya dari efek kebebasan pers ini muncul krisis moral dan kegersangan spiritual yang semakin memprihatinkan di tengah masyarakat. Krisis moral yang terjadi di tengah masyarakat memang harus dinilai secara jernih dan obyektif, karena faktor penyebabnya bisa bermacam-macam. Bukan hanya karena kehadiran media massa, namun bisa juga karena faktor budaya, hingga pemahaman agama yang semakin dangkal. Munculnya krisis

¹ Quraish Shihab, *Lentera Hati*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 72

² Faisal Ismail, *Pencerahan Spiritualitas Di Tengah Kemelut Zaman Edan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 66

moral yang melanda masyarakat saat ini tentu menjadi tantangan dakwah yang serius, dan menjadi tanggung jawab bersama.

Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah masyarakat. Media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta yang kuat, sehingga diharapkan tidak ada keberpihakan di dalamnya. Namun demikian, media massa tidak selalu bisa obyektif dalam menjalankan fungsinya. Terkadang media massa terlalu berorientasi bisnis, sehingga perhitungan yang dipakai adalah keuntungan materi semata. Ketika mempublikasikan berita dan foto misalnya, nilai-nilai etika kurang diperhatikan, yang penting secara materi media tersebut bisa memperoleh keuntungan.

B. Peran Media Massa

Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita yang jujur, obyektif dan didukung oleh fakta yang kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberitakan.

Media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebarkan berbagai informasi di tengah masyarakat. Berita yang dipublikasikan lewat media massa, baik yang positif maupun negatif akan begitu cepat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga akan mempengaruhi cara pikir masyarakat. Manakala informasi yang dipublikasikan itu jujur dan obyektif tentu sangat positif hasilnya bagi masyarakat. Sebaliknya manakala informasi yang dipublikasikan itu bohong, fitnah dan mengundang permusuhan, akan menimbulkan dampak negatif dan bahkan bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Itulah sebabnya menurut John Hohenberg, bahwa berita di media massa harus selalu memperhatikan faktor aktualitas, kejujuran dan pendidikan. Dalam mengemban fungsi tersebut, maka tidak berlebihan kalau media massa disebut memiliki tugas luhur yang ikut andil dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.³

Berita yang disajikan oleh media massa dengan sendirinya akan menimbulkan opini yang bervariasi di tengah masyarakat. Karena setiap

³ John Hohenberg, *Free Press People*, (New York: The Macmillan Co, 1973), hlm. 103

berita yang muncul di media, menurut William Rivers, bisa dipersepsi berbeda oleh masyarakat. Untuk itu agar opini masyarakat tidak persepsi pada sebuah pemberitaan, maka kata kuncinya perlu kejujuran setiap wartawan dalam menyajikan berita.⁴

Dalam tinjauan dakwah, manakala berita yang ditulis di media senantiasa memperhatikan aspek kejujuran, dapat dikategorikan sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak pada kebaikan dan mencegah kejahatan). Melalui berita yang jujur masyarakat akan mendapat informasi yang benar, sehingga bisa memberi manfaat positif. Sebaliknya, manakala media massa menyajikan berita bohong, tentu akan menyesatkan dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dengan demikian jelas betapa pentingnya aspek kejujuran dalam publikasi berita di media massa.

Mengingat peran pers yang begitu penting, pemerintah telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Hal ini merupakan turunan perwujudan dari pasal 28 UUD 1945. Artinya, agar fungsi dari hak tersebut tidak berbenturan dengan berbagai institusi lain khususnya kepentingan masyarakat sebagai konsumen utama pers.

Dalam perspektif budaya Islam pers sesungguhnya adalah bagian dari pendukung kegiatan dakwah dalam rangka mewujudkan pembangunan tengah masyarakat. Yang dimaksud dengan "dakwah pembangunan" adalah mempergunakan dakwah untuk pembangunan. Dakwah adalah bertujuan untuk mengajak orang lain supaya melakukan perbuatan baik, sedangkan pembangunan adalah usaha untuk menjadikan masyarakat lebih baik dalam arti luas, baik aspek material maupun spiritual. Cara mengajak yang dimaksud dalam dakwah Islam bisa lewat media massa atau juga pesan lewat tatap muka. Dengan demikian tujuan dakwah dan tujuan pembangunan sesungguhnya identik. Tujuan pembangunan dalam konteks Indonesia adalah jelas, yaitu pembangunan seutuhnya untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal ini berarti lebih jauh dari faktor ekonomi saja, yang merupakan prakondisi yang pokok bagi pembangunan manusia secara integral.⁶

Kebijakan pers (kebebasan pers) di Indonesia selalu mengalami pasang surut, tergantung penguasa politik yang berkuasa saat itu. Semakin otoriter sebuah rezim penguasa maka semakin konservatif kebijakan persnya.

⁴ William Rivers, *The Mass Media, Reporting-Writing-Editing*, (New Delhi: Universal Bookstall, 1967), hlm. 83

⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 73

⁶ H.A. Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm.

Demikian sebaliknya, semakin demokratis sebuah rezim penguasa maka semakin otonom kebijakan persnya. Pada tahun 1990-an, di tengah gairah pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ekspansi industri media, prospek kebebasan pers di Indonesia justru tampak semakin tenggelam.

Sejak peristiwa itu, kebebasan pers semakin terancam oleh berbagai aturan represif, diantaranya, mencakup Rancangan Undang-undang Penyiaran yang telah dimanipulasi oleh pemerintah. Adanya pasal-pasal yang berisi kewajiban sensor terhadap program berita televisi swasta dan penyiaran program berita dari pemerintah. Penguasa dan para pemilik modal juga menerapkan sistem pengontrolan pers melalui "budaya telepon" dan ancaman pencabutan SIUPP, sehingga pers yang seharusnya menjadi alat kontrol bagi pemerintah, berubah fungsi menjadi alat melegalkan kekuasaan. Setiap media wajib tunduk pada pemerintah, mengingat hidup-matinya media saat itu berada di tangan penguasa. Kebebasan pers yang merupakan bagian dari negara demokrasi, berubah fungsi ketika pers gagal mengambil perannya.

Sesungguhnya tidak perlu terjadi pembedelan pada pers ketika aturan main yang ada dalam kode etik jurnalistik dilaksanakan dengan baik. Melalui kode etik jurnalistik diatur bagaimana tugas jurnalistik dijalankan dengan bebas dan bertanggungjawab. Perkembangan kode etik jurnalistik pun berjalan seiring waktu hingga terjadi revisi tentang isi kode etik jurnalistik pada tanggal 6 agustus 1999 di Bandung. Pertemuan di Bandung ini menghasilkan tujuh butir kode etik wartawan Indonesia. Ermanto mengemukakan tujuh butir kode etik jurnalistik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak boleh menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi kewartawanannya.

6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informai latarbelakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.⁷

Rumusan kode etik yang baru ini diharapkan mampu memberi solusi terhadap kegelisahan yang dihadapi wartawan selama ini dalam menjalankan profesi kewartawanan di tengah masyarakat. Adanya berbagai tekanan, baik yang dilakukan pemerintah terhadap wartawan, konsumen media terhadap wartawan, atau dari wartawan kepada narasumber, adalah kekhawatiran yang selalu menggelisahkan wartawan selama ini, khususnya sebelum reformasi.

C. Kode Etik dan Kebebasan Pers

Kode etik jurnalistik yang merupakan pengganti dari kode etik wartawan Indonesia, merupakan landasan hukum bagi setiap wartawan. Dengan demikian, kode etik jurnalistik adalah standar nilai yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam menjalankan profesi kewartawanan. Seorang wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik, berarti mereka belum mempunyai tujuan dan acuan dalam melaksanakan tugas kewartawanan. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa taat pada aturan yang ada dalam kode etik jurnalistik, dapat dinilai sebagai orang yang menghormati hak dan kewajiban pers. Ini berarti mereka tergolong profesional dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Kode etik jurnalistik dibuat oleh wartawan sendiri melalui kongres sehingga keputusan dan kesepakatan yang lahir dari kongres tersebut mengikat bagi anggota organisasi tersebut. Lewat kode etik tersebut diharapkan ada kesadaran yang datang dari diri wartawan sendiri untuk mengatur dirinya dalam menjalankan profesi kewartawanan sebaik-baiknya. Wartawan Indonesia juga sadar, bahwa dalam menjalankan tugas sehari-hari mereka banyak menghadapi resiko, baik terkait dengan profesinya atau pihak kedua yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers. Guna menghindari resiko itu semua, perlu suatu perangkat aturan agar tugas kewartawanan dapat berjalan dengan baik. Keberadaan dari kode etik jurnalistik sebagai aturan yang mengikat bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.⁸

⁷ Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis dan Teoritis* (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005), hlm. 167-168

⁸ Ashadi Siregar, *Menjadi Wartawan Profesional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 73

Kode etik berbeda antara satu negara dengan negara lain. Kode etik merupakan refleksi keadaan dan tradisi yang berkembang di setiap negara. Kode etik terkonsentrasi pada informasi yang dapat dipercaya dan menghindari distorsi, penindasan, bias sensasionisme, dan secara luas akan berkaitan dengan pandangan peran jurnalis di tengah masyarakat.

Dalam tataran realitas, kode etik juga sering disalahgunakan oleh sebagian oknum wartawan dalam usaha memperkaya diri. Tindakan memeras sumber berita sering dilakukan wartawan yang tidak memiliki etika dalam menerapkan kode etik jurnalistik. Perilaku sebagian wartawan yang demikian jelas sangat monodai citra wartawan. Berbagai penyimpangan disadari sering dilakukan wartawan, baik dalam pembentuk pemberitaan maupun penyajian foto-foto jurnalistik. Di era kebebasan pers saat ini, begitu sering terjadi penulisan berita bohong sampai pemuatan foto-foto vulgar yang cenderung merusak moral masyarakat. Hal ini semua menjadi tantangan bagi insan pers dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Lembaga pers terus berusaha memperbaiki citra wartawan di tengah masyarakat. Tokoh-tokoh pers Indonesia yang mayoritas muslim selalu berusaha memasukkan *nilai-nilai Islam* dalam kode etik jurnalistik. Hal ini dimaksudkan agar wartawan Indonesia bisa memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugas kewartawanan. Di tengah banyaknya tantangan moral dalam sajian pers dewasa ini, membuat semakin pentingnya meningkatkan aktualisasi etika dalam profesi kewartawanan. Usaha penguatan etika tersebut tidak hanya sebatas teori dalam kode etik jurnalistik, namun para wartawan juga membentuk wadah persatuan wartawan muslim Indonesia sebagai bukti komitmen pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan tugas kewartawanan.

Independensi dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hasrat komersialisasi media harus senantiasa dijaga agar citra wartawan di tengah masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu pers harus memiliki dan merealisasikan kode etik jurnalistik serta prinsip profesionalisme dan juga kontrol dari berbagai pihak. Kontrol dalam profesi kewartawanan tidak hanya sebatas melakukan peliputan berita, namun juga diperlukan ketika sebuah informasi telah disajikan kepada konsumen media. Kontrol tidak perlu dilakukan ketika kode etik jurnalistik sudah dipahami dan diaktualisasikan oleh setiap wartawan dalam menjalankan tugas. Wartawan adalah bagaikan seorang sopir yang berhak menentukan ke mana arah kendaraan akan dibawa. Begitu juga halnya wartawan, mereka mempunyai banyak informasi, sehingga

merekalah yang mengolah informasi tersebut menjadi baik atau tidak atau bohong dan bahkan menjadi sumber fitnah.⁹

Idealnya semua kode etik jurnalistik yang disusun oleh masing-masing organisasi wartawan, berfungsi untuk menjamin berlakunya dan standar jurnalistik yang profesional serta membuat media bertanggung jawab pada semua isi pemberitaan. Selanjutnya kode etik diharapkan mampu berperan melindungi hak masyarakat memperoleh informasi yang obyektif dari media massa. Dengan demikian kode etik jurnalistik sekaligus berfungsi sebagai payung hukum wartawan dari segala macam resiko kekerasan atau intimidasi dari kedua pihak.

Ermanto menjelaskan bahwa untuk menjadi wartawan profesional harus lebih dulu bisa mengaktualisasikan kode etik jurnalistik dalam tugas sehari-hari, karena sesungguhnya kode etik jurnalistik itu adalah alat untuk mendisiplinkan diri. Wartawan boleh membuat aturan sendiri dilaksanakan atas kemampuan sendiri dan kehendak sendiri selama bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kalau semua pelaku media patuh pada kode etik jurnalistik yang telah disepakati bersama, diharapkan dapat menerapkan regulasi sendiri.¹⁰

Jika diamati lebih lanjut dan cermat, terjadinya kasus tindak pidana (delik) terhadap pers bukan semata-mata karena terbelenggunya hakekat kebebasan pers. Akan tetapi delik pers bisa terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik oleh sebagian oknum wartawan. Pelanggaran juga tidak semata-mata dilakukan oleh wartawan, namun juga pemerintah dan masyarakat pun bisa terjebak dalamnya.

Perkembangan media massa dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut telah mengantar masing-masing media berbenah dan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Pengembangan media berusaha maksimal untuk menjadi yang terbaik, baik dari segi kuantitas dan juga kualitas. Salah satu sumber utama kemajuan media ini bisa dilihat dari perolehan iklan. Semakin banyak iklan yang diperoleh media tersebut, maka semakin kuatlah media tersebut, karena iklan adalah bagaikan nafas bagi media, sehingga media massa berusaha keras untuk mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya.

⁹ Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994) hlm. 166.

¹⁰ Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis dan Teoritis* (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005) hlm. 166.

Namun di sisi lain, sesungguhnya ada efek negatif dari kebebasan pers ini bagi umat. Ketika masyarakat (umat Islam) begitu saja menerima publikasi yang ada di media dan mencontoh hal-hal negatif yang disajikan media tersebut, tentu akan membuat dampak negatif bagi umat. Ketika media massa misalnya menyajikan cara berpakaian yang tidak senonoh (membuka aurat), ditonton dan dicontoh oleh umat, tentu efeknya sangat negatif. Demikian pula ketika media massa menyajikan acara yang disukai anak-anak bersamaan dengan waktu sholat maghrib dan waktu mengaji, sehingga mereka lebih memilih acara televisi, juga membuat efek negatif bagi umat. Dalam realitanya, dewasa ini semakin banyak anak-anak yang tidak bisa membaca al Qur'an, karena pengaruh media massa (TV) yang menyajikan acara-acara menarik bagi anak-anak. Inilah tantangan dakwah ke depan dalam menyiasati media massa yang memiliki aspek positif dan negatif bagi masyarakat.

D. Solusi Dakwah di Era Kebebasan Pers

Ketika media massa begitu banyak memberitakan peristiwa kemunkaran, kriminal, dan bahkan menyajikan photo-photo yang mengandung unsur pornografi, sebagian umat Islam menilai bahwa media massa tidak obyektif lagi dan bahkan dinilai telah ikut andil menyebarkan kemunkaran. Publikasi media pada aspek pornografi yang semakin marak dewasa ini menjadi keresahan umat yang ingin menguatkan nilai-nilai dakwah. Padahal dari aspek perencanaan dakwah, media massa sesungguhnya adalah menjadi bagian yang sangat urgen. Perencanaan dakwah akan bisa menjadi lebih maksimal manakala pelaku dakwah bisa memanfaatkan media massa dengan maksimal.

Apalagi dewasa ini seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka dakwah tidak bisa lepas dari media massa. Walaupun terkadang media massa dibenci, namun peran dan fungsi media massa memang harus diakui sangat luar biasa. Media massa sebagaimana dijelaskan oleh Rosihan Anwar memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai *media informasi dan pendidikan, media hiburan, dan media kontrol sosial*. Dakwah dengan memanfaatkan media massa, akan bisa menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat luas. Apalagi saat ini tatkala masyarakat sudah begitu akrab dengan media massa, maka dakwah pun harus bisa mengisi ruang-ruang yang ada di media massa, agar masyarakat tidak hanya mendapatkan tayangan dan informasi yang negatif.

Pentingnya aspek media massa dalam perencanaan dakwah bisa dilihat dari unsur-unsur komunikasi sebagaimana dijelaskan Hamzah Ya'qub.

la menjelaskan bahwa efektifitas dakwah bisa maksimal memperhatikan lima unsur komunikasi dakwah, yaitu: *komunikator, pesan dakwah, media, komunikan/audiens, dan efek.*

Persoalannya sekarang, media massa banyak dikuasi oleh orang jauh dari nilai-nilai Islam, sehingga nuansa dakwah dalam media tergolong minim dan bahkan tidak bisa mengimbangi hal-hal yang dia negtif. Menurut Jalaluddin Rakhmat, ada dua cara yang bisa ditempuh untuk memaksimalkan dakwah lewat media massa. *Pertama*, umat Islam media massa sendiri, sehingga bisa secara maksimal mengelola pesan-pesan dakwah lewat media massa tersebut. *Kedua*, memanfaatkan media massa yang ada dengan memasukkan pesan-pesan dakwah ke media tersebut berarti harus disiapkan dan direncanakan secara maksimal tenaga-tenaga dakwah yang terampil dalam bidang media massa. Sekali lagi harus diingat bahwa dalam perencanaan dakwah saat ini penguatan dalam bidang media massa ini merupakan bagian yang sangat urgen. Berikut akan diuraikan sekilas tentang pentingnya media massa dalam perencanaan dakwah. Fokus lagi dalam tulisan ini akan diuraikan urgensi profesi menulis di media massa sebagai salah satu dari sekian banyak aspek penting dalam perencanaan dakwah.

Profesi menulis

Profesi menulis sesungguhnya adalah merupakan profesi yang menantang dan penuh dengan tantangan. Menjadi seorang penulis, baik itu menulis buku, menulis naskah di jurnal, majalah dan surat kabar dituntut keahlian tersendiri. Mereka yang menjadi penulis tentu harus memiliki wawasan yang luas terkait dengan bidang keahlian yang ia tekuni, sehingga tidak bisa terburu-buru. Demikian pula halnya dalam menulis naskah keagamaan/dakwah, baik untuk naskah buku, jurnal, majalah, surat kabar, bulletin dan makalah harus memiliki keahlian dalam bidang tersebut, sehingga informasi yang disampaikan menjadi menarik.

Dewasa ini naskah-naskah keagamaan, baik dalam bentuk buku dan naskah dalam publikasi di media yang lain, mendapat tempat tersendiri di tengah masyarakat. Di tengah krisis moral yang semakin memprihatinkan saat ini masyarakat membutuhkan naskah-naskah keagamaan/dakwah yang diharapkan bisa menjadi pencerahan bagi mereka. Ketika naskah-naskah

umum dan sekuler begitu banyak muncul di tengah masyarakat, di sisi lain naskah-naskah keagamaan sebagai bagian dari penyampaian pesan-pesan dakwah juga menjadi dambaan masyarakat.

Secara teknis ada perbedaan dalam menulis naskah buku dan naskah tulisan untuk media massa seperti surat kabar. Namun demikian, dari aspek isi tulisan, baik untuk naskah buku maupun naskah tulisan untuk media massa (surat kabar dan majalah) bisa mengandung muatan keagamaan (dakwah). Naskah buku sebagai karya ilmiah murni memiliki kriteria tersendiri, demikian pula naskah untuk media massa seperti majalah dan surat kabar, memiliki kriteria yang berbeda dengan penulisan buku. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas teknis penulisan buku dan penulisan naskah di media massa.

Teknis Penulisan Buku

Menulis naskah buku sebagai bagian dari karya ilmiah murni memiliki kriteria sendiri. Buku biasanya mengulas tema atau persoalan tertentu, bisa menyangkut masalah keagamaan, budaya, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Lazimnya penulis buku memiliki keahlian sesuai dengan tema yang ditulis dalam buku tersebut, sehingga kualitas buku tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Ketika penulis buku sudah memiliki naskah yang siap dipublikasikan, biasanya untuk proses penerbitan atau publikasi, pihak penerbit membuat perjanjian dengan penulis terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka setujui dalam penerbitan buku tersebut. Lebih lanjut berikut ini akan diuraikan secara ringkas teknis penulisan buku. Menurut Mien A Rifai, teknis penulisan buku minimal memiliki delapan aspek, yaitu:

- judul
- nama Penulis
- kata pengantar (penerbit/penulis)
- daftar isi
- pendahuluan
- pembahasan
- kesimpulan
- daftar rujukan/pustaka.¹²

Setiap buku tentu harus memiliki judul, dan diperlukan keahlian tersendiri untuk membuat judul buku yang menarik, agar pembaca bisa tertarik dengan melihat judul buku tersebut. Penulis buku juga harus memperhatikan bahwa

¹¹ Hamdan Daulay, *Pasang Surut Dakwah Dalam Dinamika Budaya, Politik dan Keluaran* (Yogyakarta: Yayasan Fokus, 2009), hlm. 118.

¹² Mien A Rifai, *Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), hlm. 126

judul buku harus benar-benar sesuai dengan kandungan isi buku tersebut. Jangan sampai ada judul buku yang tidak sesuai dengan isi buku.

Selanjutnya, dalam penulisan buku juga harus selalu mencantumkan nama penulis agar jelas pertanggungjawaban keilmuannya. Buku sebagai karya ilmiah harus dengan jelas mencantumkan nama penulis dan lebih lanjut lagi manakala dilengkapi dengan biodata penulis agar lebih jelas diketahui keahlian penulis dengan buku yang ditulis.

Teknis penulisan buku juga lazimnya memakai kata pengantar, baik yang dibuat oleh penulis buku, atau pihak penerbit, atau juga orang lain yang memiliki keahlian dalam bidang yang ditulis dalam buku tersebut. Kata pengantar ini dimaksudkan untuk memberi uraian lebih jelas tentang inti dari buku tersebut.

Buku juga harus memiliki daftar isi agar pembaca bisa lebih mudah mengetahui bagaimana kerangka buku tersebut. Dengan melihat daftar isi sebuah buku, pembaca terbantu untuk mengetahui mana bagian yang lebih menarik untuk dibaca. Demikian pula halnya dengan pendahuluan diperlukan dalam teknis penulisan buku, agar pembaca bisa memahami apa yang akan diuraikan lebih lanjut dari keseluruhan buku tersebut.

Bagian pembahasan merupakan bagian penting dan merupakan inti dari penulisan buku. Dalam bagian pembahasan inilah penulis buku menguraikan secara mendalam dengan didukung data-data yang relevan serta analisis yang kritis dari penulis.

Selanjutnya, teknis penulisan buku juga lazimnya membuat kesimpulan agar lebih jelas bagaimana penulis member kesimpulan dari keseluruhan uraian yang disampaikan dalam buku tersebut. Terakhir, sebagai teknis penulisan karya ilmiah, buku juga harus mencantumkan daftar rujukan/pustaka untuk menghindari adanya karya jiplakan atau plagiat. Penulis harus dengan jujur menyebut berbagai rujukan yang dipakai dalam penulisan buku tersebut, sehingga pencantuman daftar rujukan/pustaka menjadi bagian yang sangat urgen dalam penulisan buku.

Teknis Penulisan Artikel

Dewasa ini semakin banyak media massa cetak yang hadir di tengah masyarakat, baik yang beredar di tingkat lokal, maupun yang beredar secara nasional. Kehadiran media massa tersebut dengan sendirinya menjadi peluang yang cukup besar bagi masyarakat untuk ikut andil di dalamnya lewat karya tulis yang dikirim ke media massa yang ada. Namun di sisi lain menulis di media massa adalah juga merupakan tantangan karena setiap penulis akan bersaing dengan penulis lain. Media massa hanya menyediakan kolom yang terbatas, sementara tulisan yang masuk ke meja redaksi cukup

banyak, sehingga tulisan terbaiklah nanti yang akan bisa dipublikasikan. Ini berarti setiap penulis harus bekerja keras untuk memenangkan persaingan dengan membuat naskah tulisan yang berkualitas.

Secara umum teknis penulisan naskah artikel menurut Rosihan Anwar adalah sebagai berikut:

- memilih tema yang aktual
- memiliki nilai berita
- menulis judul
- mencantumkan nama penulis
- pendahuluan, isi, dan penutup
- memakai bahasa jurnalistik
- melakukan analisis yang tajam
- artikel cukup sekitar 4 halaman kuarto dengan 2 spasi.¹³

Dalam persaingan menulis di media massa, menurut Suroso setiap penulis harus memakai strategi yang tepat, sehingga bisa berhasil memenangkan persaingan. Beberapa strategi yang perlu diperhatikan penulis di media massa, di antaranya dengan memakai bahasa jurnalistik, tidak bertele-tele, kalimat-kalimat yang bernas (cerdas), metaforik, anekdotik, dan komunikatif. Artinya, bahasa jurnalistik yang digunakan mampu mengkomunikasikan pesan kepada pembaca dari berbagai tingkat pendidikan.¹⁴

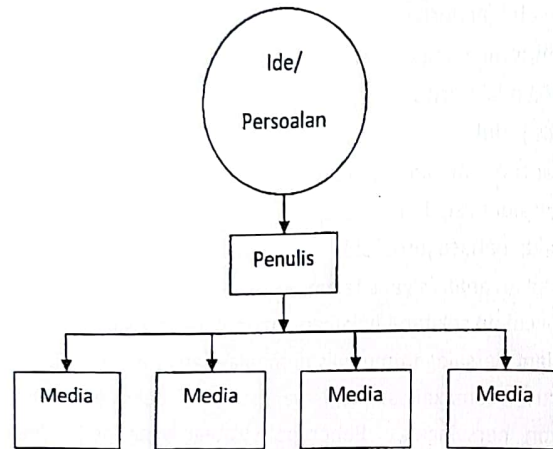
Penulis yang baik tentu harus memiliki keuletan dan kesabaran dalam menekuni profesi ini. Jangan sampai seorang penulis berhenti dan menyerah ketika tulisan yang dikirim ke media massa tidak dimuat. Penulis yang baik hendaknya harus tetap tegar dan terus menulis, entah dimuat atau tidak dimuat tulisan yang dikirim. Sebab dalam dunia tulis menulis sesungguhnya merupakan hal yang biasa manakala naskah tulisan yang dikirim ke media massa tidak selalu dimuat. Hal ini bisa dimaklumi karena terbatasnya kolom yang tersedia di tengah banyaknya tulisan yang masuk ke meja redaksi.

Berikut ini peta konsep tentang realitas media massa yang semakin banyak hadir di tengah masyarakat sebagai pilihan bagi setiap penulis untuk mengirimkan tulisannya. Lazimnya bagi para penulis yang akan mengirimkan tulisan ke media massa harus bisa memilih tema yang aktual, sehingga media massa tertarik untuk mempublikasikannya. Namun harus dipahami bahwa

¹³ Rosihan Anwar, *Kiat Menulis Artikel di Media Cetak*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm.

¹⁴ Suroso, *Panduan Menulis Artikel dan Jurnal*, (Yogyakarta: Pararaton Publishing, 2007) hal. 97

setiap penulis tidak boleh membuat tulisan ganda yang dikirim ke beberapa media massa. Sebab cara yang demikian menyalahi etika penulisan. Berikut ini peta konsep menulis naskah artikel di media massa:



Dari peta konsep di atas, bisa dijelaskan bahwa menyampaikan pesan-pesan dakwah lewat media massa sesungguhnya memiliki peluang yang cukup besar. Seorang penulis (juru dakwah) bisa membuat artikel yang mengandung pesan-pesan dakwah, dengan mengulas berbagai persoalan aktual yang ada di masyarakat. Selanjutnya penulis bisa mengirimkan naskah artikel tersebut dengan memilih media massa yang relevan dari sekian banyak media massa yang ada. Para penulis artikel memiliki kebebasan untuk memilih ke mana naskah tulisannya di salurkan. Ini tentu merupakan peluang yang sangat besar dalam rangka membuadayakan dakwah lewat media massa. Sebab kalau juru dakwah tidak memanfaatkan media massa untuk aktivitas dakwah, dikhawatirkan nanti akan semakin banyak momentum kemungkaran yang ditampilkan oleh media massa. Untuk itu menjadi sangat penting manakala juru dakwah memiliki kemampuan dan keterampilan berdakwah lewat media massa.

E. Kesimpulan

Dalam aktivitas dakwah yang baik, idealnya aspek media massa harus diperhatikan secara serius sehingga dakwah diharapkan bisa menghasilkan efek yang maksimal. Dewasa ini banyak umat Islam yang menilai bahwa kehadiran media massa banyak menyajikan hal-hal negatif, sehingga media massa dinilai ikut andil dalam menyuburkan kemungkaran. Namun di sisi lain di era modernisasi saat ini kehadiran media massa menjadi sangat urgen

dalam aktivitas dakwah. Umat Islam tidak perlu membenci media massa, justru umat Islam harus bersahabat dengan media massa. Media massa harus dikelola dengan baik, sehingga media massa bisa menjadi alat untuk menyukseskan tugas-tugas dakwah. Untuk itu, ke depan umat Islam perlu menyiapkan juru dakwah yang terampil dalam bidang media massa.

Kebebasan pers yang ada saat ini dirasakan menjadi tantangan serius bagi aktivitas dakwah. Karena dengan dalih kebebasan pers, media massa begitu leluasa menyajikan berita dan photo yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Padahal di sisi lain media massa dengan adanya kode etik jurnalistik diharapkan jangan sampai keluar dari nilai-nilai etika. Di sinilah diharapkan kehadiran dakwah untuk bisa memanfaatkan media massa agar bisa membuat keseimbangan dalam penampilan media massa. Kalau media massa banyak diisi dengan pesan-pesan dakwah, maka dengan sendirinya akan membuat wajah media massa bisa lebih sejuk, religius dan bisa memberi solusi bagi masyarakat yang dilanda kegersangan spiritual dewasa ini.

Daftar Pustaka

- Ashadi Siregar, *Menjadi Wartawan Profesional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1990
- Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis Teoritis*, Cinta Pena, Yogyakarta, 2005
- Faisal Ismail, *Pencerahan Spiritualitas di Tengah Kemelut Zaman*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2008
- Hamdan Daulay, *Pasang Surut Dakwah Dalam Dinamika Budaya, Politik Keluarga*, Yayasan Fokus, Yogyakarta, 2009.
- , *Wartawan dan Kebebasan Pers Ditinjau dari Berbagai Perspektif*, Press, Yogyakarta, 2013
- H.A. Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, Bandung, 1998
- Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam*, Rosdakarya, Bandung, 1998
- Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Mizan, Bandung, 1991
- John Hohenberg, *Free Press Free People*, The Macmillan Co, New York, 1992
- Mien A. Rifai, *Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan, dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1978
- Quroish Shihab, *Lentera Hati*, Bandung, Mizan, 1994
- Rosihan Anwar, *Kiat Menulis artikel di Media Cetak*, Rosdakarya, Bandung, 2000
- Suroso, *Panduan Menulis Naskah Artikel dan Jurnal*, Pararaton Publishing, Yogyakarta, 2007.
- Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994
- Willieam Rivers, *The Mass Media, Reporting, Writing, Editing*, New Dehli University Bookstall, 1987